

## TAJUK RENCANA

### Pelaku Usaha di Ujung Tanduk

**PEMERINTAH** sudah memutuskan PPKM Darurat dipastikan diperpanjang hingga akhir Juli 2021. Bukan sampai 6 minggu atau hingga 17 Agustus seperti hoaks yang banyak beredar. Perpanjangan tersebut diharapkan akan lebih menekan penularan virus Covid-19 yang saat ini masih menjadi-jadi di Indonesia.

Dampaknya paling signifikan, adalah menjertinya para pedagang, tukang ojol, buruh harian lainnya, seniman atau yang berkait pariwisata dan pengusaha hotel. Dan ini tidak sedikit jumlahnya. Karenanya, Gubernur DIY Sultan HB X juga sudah meminta agar pemerintah pusat, memperhatikan masalah tersebut.

Gubernur DIY mengingatkan, beda dengan tahun 2020 ada peraturan yang jelas berkait dengan *refocusing*. Tetapi untuk 2021 tidak ada. Karenanya mengharapkan Mendagri untuk segera mengeluarkan peraturan tersebut (KR 19/7) agar DIY bisa leluasa.

Keluhan tersebut sudah diungkapkan ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima DIY, Muklas Madani. Menurutnya, nasib para pelaku usaha sudah benar-benar di ujung tanduk, tinggal menunggu mati. Omslet turun drastis semenjak ada pandemi. Kondisi lebih diperburuk adanya PPKM Darurat yang membuat para pelaku usaha klenger.

Sebenarnya untuk mengantisipasi hal tersebut, Presiden sudah menginstruksikan Bantuan Sosial (Bansos) dimajukan, agar bisa dimanfaatkan publik terdampak pada saat PPKM Darurat dilanjutkan. Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan dikerahkan untuk mengawal penyaluran obat-obatan gratis, suplemen dan vitamin semuanya gratis. Khusus un-

tuk PPKM Darurat digelontorkan Bansos tambahan Rp 39,19 triliun. Malahan Bansos tersebut sudah digelontorkan sejak awal Juli.

Bantuan tersebut, di antaranya meliputi beras Bulog 10 Kg untuk masing-masing 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian bantuan sosial tunai untuk 10 juta KPM. Kemudian pemberian tambahan ekstra 2 bulan untuk 18,9 juta KPM sembak.

Tambahannya untuk 5,9 juta KPM usulan, untuk kartu Pra Kerja Rp 10 triliun serta subsidi listrik rumah tangga untuk 450 dan 900 watt diperpanjang 3 bulan sampai Desember 2021. Termasuk bantuan untuk kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru serta dosen selama 6 bulan. Bahkan alokasi anggaran untuk kesehatan ditambah Rp 33,21 triliun guna perawatan pasien Covid-19. Presiden juga memberikan bantuan 2 juta obat-obatan untuk yang isolasi mandiri, yakni yang OTG atau gejala ringan.

Banyak sekali istilah dan aturannya. Namun mengapa sering banyak mengeluh tak dapat atau kurang tahu? Salah satunya soal sosialisasi. Dalam hal ini, pemerintah menggelar sosialisasi lewat telekonferensi, media daring, dan surat edaran kepada (KPM). Namun, hal tersebut tak efektif. Karena banyak penerima manfaat yang tak tahu nilai bantuan dan berapa lama program tersebut.

Informasi melalui WA misalnya, sangat terbatas karena belum semua dievaluasi. Membangun komunikasi termasuk aktualisasi data warga sampai tingkat bawah, harus aktif. Mulai dari RT sampai kelurahan harus aktif, sehingga Bansos bisa mengalir sesuai harapan. (\*\*\*)

**MIRIS**, ngeri dan entah kalimat apa lagi yang menggambarkan situasi saat ini. Ketika kita membaca berita, atau menyaksikan siaran televisi yang terus menerus menyiarkan perkembangan kasus Pandemi Covid-19 di tanah air dan belahan dunia lainnya. Bisa dibayangkan, benda oksigen yang semula hanya kita lihat di RS atau di tukang las, tiba-tiba menjadi barang sangat penting bagi kehidupan.

Coba baca berita, puluhan orang meninggal gara-gara rumah sakit kehabisan oksigen. Orang kemudian antri untuk mendapatkan oksigen, padahal belum pernah terpikirkan betapa oksigen menjadi rebutan. Menjadi barang langka, sehingga sampai pemerintah membuat Satgas oksigen. Di media sosial juga sangat cepat mengabarkan, sahabat atau kerabat yang kemarin masih komunikasi melalui medsos, tiba-tiba dikabarkan meninggal dunia. Badai Covid telah meluluhlantakkan semuanya.

Informasi yang sering muncul di media sosial yang menyesatkan, membuat masyarakat semakin runtu, pesimis dan seperti tak punya harapan. Hasil riset Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dari 26 Mei ñ 2 Juni 2021, menunjukkan tingkat resiliensi orang Indonesia pada berbagai tingkatan cenderung rendah. Resiliensi adalah kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit. Saat pandemi yang belum tahu kapan berakhir, akan sangat berbahaya jika resiliensi turun.

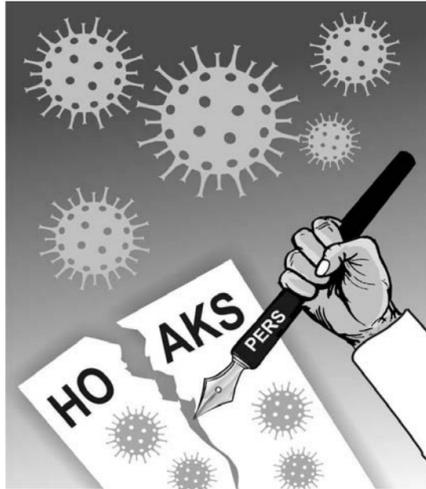
#### Ajakan

Akhir-akhir ini muncul postingan di medsos, ajakan agar publik jangan lagi baca informasi di media yang menyangkut Covid-19. Postingan ini beredar santer di media sosial, muncul di sejumlah kota. Motifnya sama, agar tidak lagi membaca informasi soal Covid-19.

Ajakan yang terakhir, untuk tidak baca media mungkin dalam pengertian yang

#### Octo Lampito

salah. Yakni untuk media sosial yang banyak mengemukakan hoaks. Tetapi menolok untuk tidak membaca yang informasinya benar, menjadi berbahaya. Publik akan buta informasi, tidak tahu apa yang terjadi. Bahwa pandemi masih atau tidak, apa yang harus dilakukan, bansos kapan dibagi, bagaimana mengatasi kekurangan oksigen dan mencari



KR-JOKO SANTOSO

shelter. Kita akan kehilangan arah. Padahal justru pada saat semacam inilah diperlukan informasi yang akurat supaya publik tidak tersesat.

Ajakan untuk tidak membaca, mendingarkan atau melihat informasi publik juga melanggar UUD 1945. Bahwa: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Pers arus utama memang menghadapi tantangan berat. Satu sisi sedang mengalami kontraksi berat, karena pandemi

## Stunting dan Jebakan Konsumtif Keluarga PS

**KASUS** stunting bak fenomena gunung es. Beruntungnya, pendataan keluarga dapat menjadi pijakan harapan bagi terciptanya basis data terpadu terkait dengan kependudukan. Berbagai kebijakan pemerintah pun telah digulirkan untuk mencegah dan menangani stunting. Sayangnya, bonus demografi justru memicu permasalahan baru, semisal pengabaian hak-hak anak, pengasuhan yang tidak optimal, dan bahkan penelantaran anak.

Sebenarnya, berbagai macam bantuan sosial diberikan pada keluarga prasejahtera (PS) dengan peruntukan sebagai tambahan pemenuhan kebutuhan gizi dan nutrisi anak. Pendamping sosial dan pilar-pilar sosial lainnya telah memberikan psikoedukasi terhadap keluarga pra-sejahtera. Harapannya, bantuan sosial dapat tepat menasar anak. Jangan sampai, bantuan sosial digunakan untuk kepentingan konsumtif 'egois' orang tua semisal membeli rokok, pulsa, apalagi miras. Akan terdapat sanksi jika keluarga penerima manfaat melakukan pelanggaran.

Penanganan stunting sebenarnya terkait dengan hak anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tegas menyatakan: "Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan untuk membantu tumbuh kembangnya." Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak akibat asupan nutrisi yang buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak adekuat. Penyebab stunting demikian multidimensi. Pengasuhan yang buruk, sanitasi yang rendah, tidak mendapat ASI eksklusif, dan kurangnya nutrisi dapat menjermuskan anak ke dalam 'penjara' stunting.

#### Pendapatan-pengeluaran

Keluarga PS bisa berdaya apabila memiliki siklus pendapatan-pengeluaran yang sehat. Untuk memenuhi gizi pun, tidak harus membeli. Masyarakat prasejahtera terbiasa memelihara beragam unggas yang

#### Nurul Lathiffah

dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Selain itu, banyaknya daerah aliran sungai dapat dimanfaatkan untuk memancing. Dalam hal sumber daya alam, sebenarnya daya dukung ketersediaan pangan untuk mencegah stunting begitu melimpah.

Selain itu, posyandu pun aktif diselenggarakan dengan prokes. Deteksi dan diagnosis stunting juga sudah mulai dilakukan. Tenaga kesehatan dan tenaga kesejahteraan sosial juga melakukan edukasi bahwa stunting bukanlah aib. Justru, stunting pada anak harus ditangani dalam upaya memberikan hak tumbuh kembang anak.

Tidak kurang-kurangnya pemerintah berupaya untuk mencegah dan menurunkan angka stunting. Hanya saja, jebakan konsumtif keluarga PS demikian rumit. Tidak seimbangnya pendapatan dengan pengeluaran membuat ketahanan keluarga terganggu, hingga abai terhadap hak-hak anak. Rokok misalnya, menjadi jebakan yang dapat memerangkap keluarga prasejahtera. Harga rokok yang mahal, dan dikonsumsi secara berulang dapat membuat pertahanan keuangan keluarga roboh.

Yang membuat miris adalah ketika rokok menjadi kebutuhan utama, dengan mengesampingkan pemenuhan gizi anak dan keluarga lainnya. Selain konsumsi rokok yang tidak merujuk pada daya finansial keluarga, ambisi untuk berutang demi memenuhi keinginan dan juga kebutuhan merupakan 'musuh' bagi kesehatan keluarga. Apalagi, rentenir pun menjemput bola demi meraup laba berlipat ganda.

#### Tidak Gampang

Sisi lain yang juga sangat penting, bagaimana media harus menjalankan misi membasmi berita yang bersifat hoaks. Tugas yang tidak gampang. Ketika berita palsu sudah masif. Semula hanya di ruang dunia maya sudah bermutasi menjadi perbincangan dan gerakan publik. Sehingga muncullah aksi borong susu merk tertentu, atau ramai-ramai membuat sayur lodeh.

Kebersamaan media massa baik cetak, online serta elektronik justru dipuji, ketika sepekat menyatakan sebagai media tanggap bencana Covid-19. Kekompakan yang jarang terjadi di antara sesama media.

Saatnya media membangun narasi positif setiap pemberitaan, untuk menambah optimisme publik. Bukan berarti anti-melakukan kritik. Namun justru menyajikan liputan yang memberi rasa optimis publik namun harus tetap waspada. □

\*)**Drs Octo Lampito MPd, wartawan SKH Kedaulatan Rakyat.**

#### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## PIKIRAN PEMBACA

Naskah bisa dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/Scan KTP

atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.  
Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks.  
Isi menjadi tanggungjawab penulis.

### Sekolah Sentra Vaksinasi

**PEMERINTAH** melalui Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Vaksin Sinovac telah aman diberikan untuk anak usia 12-17 tahun sesudah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan izin penggunaan darurat. Izin penggunaan vaksin tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko paparan virus Covid-19 dan mendukung terwujudnya kekebalan kelompok pada masyarakat (*herd immunity*).

Kalangan siswa atau pelajar termasuk dalam rentang umur yang dapat menerima vaksin. Berkaca dari hal tersebut, sekolah dapat turut andil dengan merencanakan dan menyelenggarakan vaksinasi bagi siswa. Jika memungkinkan, sekolah juga dapat menjadi pelaksana vaksinasi bagi keluarga besar sekolah termasuk keluarga inti siswa, alumni, dan keluarga pegawai sekolah. Hal yang perlu diperhatikan adalah tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan sekolah terhadap program pemerintah dalam rangka percepatan vaksinasi, dan sebagai wujud kesiapan sekolah apabila pemerintah menginstruksikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas.

Maka untuk melaksanakan kegiatan tersebut, sekolah dapat menjalin koordinasi dan kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan maupun organisasi terkait yang berada dalam satu lingkup wilayah kabupaten/kota sebagai penyedia vaksin, tenaga kesehatan dan peralatan kesehatan. Selain itu, penyelenggaraan vaksinasi di sekolah dapat diupayakan melalui keterlibatan satuan tugas khusus Covid-19 bentukan sekolah dan para alumni dengan mempersiapkan relawan,

menyusun regulasi, mempersiapkan tempat yang sesuai, membuka serta melayani pendaftaran, mengawasi terlaksananya protokol kesehatan dan tahapan vaksinasi, menjamin pelayanan vaksin untuk dosis lanjutan, melakukan dokumentasi acara, dan melakukan evaluasi. Tak lupa, sekolah juga dapat menjadwalkan vaksinasi menjadi beberapa gelombang untuk efisiensi waktu dan mencegah terjadinya penumpukan peserta.

Siswa dan orang tua dapat berpartisipasi dengan bersikap kooperatif, datang sesuai jadwal yang telah ditentukan, menaati protokol kesehatan: memakai masker, menjaga jarak saat mengantre, mencuci tangan, dan senantiasa mematuhi arahan dari petugas agar proses vaksinasi dapat berjalan dengan lancar.

Sekolah yang telah berusaha dan lancar dalam penyelenggaraan vaksinasi, diharapkan dapat menjadi pelopor dan contoh yang baik bagi sekolah lainnya yang belum atau hendak melakukan hal serupa, agar dapat bersama-sama terlibat aktif dalam mendukung percepatan vaksinasi khususnya di sektor pendidikan. Berdasarkan dari berbagai upaya yang dapat dilakukan di atas, hal yang patut kita petik bersama ialah sekolah sebagai sentra pelaksanaan dan pelayanan vaksinasi, bukan hanya sebagai bentuk kepedulian sekolah terhadap keluarga besarnya, melainkan sebagai wujud nyata sikap *saibeg saeka praya* atau sikap gotong royong seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. □

**Ig Lintang Nusantara**  
Presidium SMA Kolese De Britto Yogya 2020/2021

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

**Penerus:** Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi ( 2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriga Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSos.

**Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afiaty, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langanan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) 565685 (Hunting)  
**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandarkr@yahoo.com, iklandarkr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm klm, 100 mm Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm), Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)  
**Alamat Percetakan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan  
**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.  
**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**  
**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

**Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampasari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.